

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkat kemiskinan periode sebelumnya terhadap tingkat kemiskinan pada periode berjalan, serta menganalisis pengaruh sejumlah faktor ekonomi yaitu proporsi tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil, laju pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia terhadap kondisi kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia sepanjang periode 2015–2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan metode *Generalized Method of Moment* (GMM) guna mengestimasi model panel dinamis kemiskinan, sekaligus mengidentifikasi bagaimana masing-masing variabel bebas memengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Hasil analisis *cross tabulation* menunjukkan bahwa variabel kemiskinan periode sebelumnya, proporsi tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil, serta tingkat pembangunan manusia memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kemiskinan pada periode berjalan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa provinsi yang mencatat tingkat kemiskinan tinggi pada suatu periode berkecenderungan untuk tetap berada pada level kemiskinan yang tinggi pula pada periode selanjutnya; pola serupa juga teramati pada variabel tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil maupun pembangunan manusia. Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi, yang justru menunjukkan keterkaitan yang relatif lemah terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini diduga dipicu oleh ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi, di mana wilayah yang ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan cenderung mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sedangkan provinsi yang perekonomiannya lebih bertumpu pada sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga mengalami tekanan ekonomi yang lebih berat, khususnya di masa pandemi.

b. Variabel tingkat kemiskinan pada periode sebelumnya terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan periode berjalan. Temuan ini mengindikasikan adanya fenomena persistensi kemiskinan di Indonesia, di mana kondisi kemiskinan suatu daerah cenderung bertahan dan berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya. Kondisi tersebut diduga bersumber dari persoalan struktural, antara lain keterbatasan akses terhadap permodalan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Ochi, 2023). Selain itu, perekonomian Indonesia masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas dan gaji rendah yang mengakibatkan rendahnya produktivitas yang kemudian membatasi kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa selama belum terjadi perubahan struktural yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap modal fisik, pendidikan, kesehatan, maupun peluang ekonomi, maka penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan akan sulit terwujud. Kondisi ini sejalan dengan konsep lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan Nurkse (1957), maupun konsep jebakan kemiskinan (*poverty trap*), yang menerangkan bahwa karakter persisten kemiskinan timbul dari rendahnya produktivitas, pendapatan, tabungan, dan investasi yang saling terkait dan saling memperkuat, sehingga kondisi tersebut sukar diputus dalam jangka waktu yang pendek.

Proporsi tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar penyerapan tenaga kerja pada sektor IMK, semakin besar pula potensi penurunan tingkat kemiskinan, yang terjadi melalui perluasan kesempatan kerja sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri Mikro dan Kecil turut mendorong aktivitas perekonomian melalui keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan ke depan (*forward linkage*), sehingga menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian di tingkat provinsi.

Variabel pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia, yang berarti semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu provinsi, semakin besar pula potensi penurunan tingkat kemiskinannya. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya aktivitas perekonomian turut mendorong terciptanya lapangan kerja baru sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dengan demikian berperan sebagai mekanisme penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperluas akses ekonomi bagi rumah tangga miskin. Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan pun turut membaik.

Variabel pembangunan manusia yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia. Hal ini bermakna bahwa semakin baik capaian pembangunan manusia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak maka semakin besar pula potensi penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi ini muncul karena peningkatan pembangunan manusia mendorong masyarakat menjadi lebih produktif, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi memutus mata rantai kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka saran yang diberikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, yaitu.

- a. Pemerintah provinsi disarankan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dan konsisten lintas tahun, dengan penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
- b. Pemerintah provinsi, terutama provinsi dengan kemiskinan yang tinggi perlu melakukan upaya agar keluar dari permasalahan struktural, serta perubahan struktur ekonomi secara berkelanjutan sebagai prioritas dengan berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi melalui peningkatan produktivitas masyarakat, perluasan kesempatan kerja produktif, serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Hal ini penting karena hasil penelitian menemukan bahwa kemiskinan pada tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tahun berjalan.

Pemerintah provinsi, terutama pada provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi perlu mendorong pengembangan sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK). Pengembangan sektor dilakukan dengan peningkatan tenaga kerja yang kemudian mendorong aktivitas ekonomi pada sektor lain dengan *backward linkage*, *forward linkage* serta menciptakan *multiplier effect* dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pemerintah provinsi, terutama provinsi dengan kemiskinan yang tinggi perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh sebagian provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi yang memberikan efek pengganda dengan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan lebih efektif dalam menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pemerintah provinsi, khususnya di provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, perlu mendorong pembangunan sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta penguatan program pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kebijakan tersebut sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, dengan tujuan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mendongkrak produktivitas, memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.